

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Menurut data BPS, pada Februari 2025, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 145,77 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 3,59 juta orang dibandingkan Februari 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Meskipun data spesifik mengenai jumlah tenaga kerja di sektor perikanan belum tersedia secara terpisah dalam publikasi tersebut, namun sektor ini termasuk dalam kategori yang mengalami peningkatan jumlah pekerja.

Di Indonesia, masyarakat pesisir pada umumnya sangat bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini menjadikan sektor perikanan kerap disebut sebagai “*employment of the last resort*”, yaitu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Artinya, sektor ini tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial masyarakat pesisir.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar. Panjang garis pantai mencapai 81.000 km dengan luas wilayah maritim sekitar 5,8

juta km². Dari jumlah tersebut, 2,78 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sekitar 60 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan berkontribusi sebesar 22% terhadap pendapatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menjadi krusial dalam pembangunan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kota Batam merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki potensi kelautan cukup besar. Luas wilayah lautnya mencapai lebih dari 2.000 km², dengan wilayah pesisir seluas 2.950 km². Letaknya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia memberikan nilai tambah tersendiri, terutama dalam hal pengembangan ekonomi kelautan dan akses pasar. Menurut data "Batam dalam Angka" (2010), luas wilayah keseluruhan Kota Batam mencapai 73,93 km².

Sebagian besar masyarakat pesisir di Kota Batam berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan. Aktivitas melaut dilakukan dari pagi hingga malam untuk memperoleh hasil yang cukup, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual. Namun demikian, tantangan pembangunan di sektor ini tidaklah ringan. Permasalahan utama yang dihadapi nelayan antara lain menyangkut kerusakan lingkungan, cuaca ekstrem, keterbatasan teknologi, dan rendahnya akses terhadap modal dan pasar.

Di sisi lain, permasalahan struktural juga turut mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Kapasitas kelembagaan dan manajerial yang lemah serta ketergantungan terhadap perantara menyebabkan nelayan sulit meningkatkan pendapatan secara mandiri. Kondisi ini diperparah dengan minimnya diversifikasi usaha, yang

membuat mereka rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan dan harga pasar.

Sebagai bentuk intervensi pemerintah, Dinas Perikanan Kota Batam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021–2026 serta Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021–2026. Salah satu fokus utama program tersebut adalah peningkatan kesejahteraan nelayan kecil melalui penguatan kapasitas produksi, perbaikan manajemen usaha, dan penyediaan akses terhadap fasilitas pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan dari sektor penangkapan dan budidaya ikan. Program ini juga menysasar keluarga nelayan sebagai pelaku utama, baik dalam sektor tangkap, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditujukan pada individu nelayan, tetapi juga pada struktur sosial-ekonomi komunitas nelayan secara keseluruhan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN mencerminkan daya beli nelayan terhadap barang dan jasa, serta menjadi parameter penting dalam menilai tingkat kesejahteraan mereka. Penggunaan indikator ini difokuskan kepada nelayan kecil, mengingat pemberdayaan nelayan kecil merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, banyak pelaku usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan juga merupakan bagian dari rumah tangga nelayan, sehingga indikator ini tetap relevan digunakan secara menyeluruh.

Tabel 1. 1 Peningkatan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Nilai Tukar Nelayan	100.50	101.08	101.85

Sumber data : LkjiP Dinas Perikanan Kota Batam 2023

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2023, NTN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 ke 2022, kenaikan NTN tercatat sebesar 0,58 poin, dan pada tahun 2022 ke 2023 meningkat sebesar 0,77 poin. Peningkatan ini menjadi indikator positif bahwa program-program kesejahteraan nelayan kecil yang dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Selain indikator NTN, data rumah tangga perikanan tangkap dan budidaya serta nilai produksi juga menunjukkan tren yang perlu diperhatikan. Meskipun program peningkatan kesejahteraan terus berjalan, data menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga perikanan dan nilai produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya air tawar, mengalami penurunan pada beberapa kecamatan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Penurunan ini berpotensi memengaruhi stabilitas pendapatan nelayan kecil yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka.

Tabel 1. 2 Data Rumah Tangga Perikanan Tangkap

Kecamatan	Satuan	2021	2022	2023
Bulang	Rumah Tangga	4.495	4.462	4.462
Galang	Rumah Tangga	4.507	4.586	4.564
Sungai Beduk	Rumah Tangga	362	360	328
Nongsa	Rumah Tangga	623	632	612
Sekupang	Rumah Tangga	361	357	458
Sagulung	Rumah Tangga	312	308	238
Bengkong	Rumah Tangga	178	174	167
Jumlah		15.786	15.802	15.744

Sumber data : Dinas Perikanan Kota Batam

Menunjukkan jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kota Batam dari tahun 2021 hingga 2023 yang bersifat fluktuatif, dengan total rumah tangga meningkat tipis dari 15.786 (2021) menjadi 15.802 (2022), lalu menurun menjadi 15.744 (2023). Kecamatan Galang dan Bulang mencatat jumlah tertinggi, mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan, sedangkan kecamatan seperti Sagulung dan Bengkong mengalami penurunan signifikan. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi pesisir dan menjadi indikator penting bagi kebijakan pemberdayaan nelayan kecil agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 1. 3 Data Nilai Produksi Kegiatan Perikanan Tangkap

Kecamatan	Satuan	2022	2023
Bulang	Rp.	430,386,950,000	444,334,519,000
Galang	Rp.	412,120,320,000	468,028,362,000
Sungai Beduk	Rp.	30,696,840,000	31,371,664,000
Nongsa	Rp.	130,108,820,000	135,306,805,000
Sekupang	Rp.	19,274,640	26,557,706,000
Sagulung	Rp.	16,825,200,000	16,589,620,000
Bengkong	Rp.	6,898,500,000	6,801,744,000
Jumlah		1,355,171,784,640	1,331,279,296,000

Sumber data : Dinas Perikanan Kota Batam

Dari data di atas menunjukkan nilai produksi kegiatan perikanan tangkap di Kota Batam tahun 2022 dan 2023. Meskipun beberapa kecamatan mengalami peningkatan, secara total terjadi penurunan nilai produksi dari Rp1.355.171.784.640 pada 2022 menjadi Rp1.331.279.296.000 pada 2023. Kecamatan Galang dan Bulang mencatat nilai produksi tertinggi, menunjukkan peran strategis wilayah ini dalam sektor perikanan tangkap. Sementara itu, nilai produksi di kecamatan seperti Sagulung dan Bengkong justru menurun, mencerminkan adanya tantangan produktivitas atau akses sumber daya. Penurunan total nilai produksi ini perlu menjadi perhatian dalam merumuskan strategi pemberdayaan nelayan dan peningkatan efisiensi produksi perikanan di Kota Batam.

Tabel 1. 4 Data Produksi Kegiatan Perikanan Budidaya Air Tawar

Kecamatan	Satuan	2021	2022	2023
Bulang	Ton	120,38	339.53	253.2
Galang	Ton	806.12	1,385.11	1,184.61
Sungai Beduk	Ton	799.37	1,058.55	761.23
Nongsa	Ton	713.62	1,379.10	637.75
Sekupang	Ton	1,064.26	4,562.78	1,204.12
Sagulung	Ton	1,215.91	2,133.46	1,185.32
Bengkong	Ton	22.36	117.76	77.01
Jumlah		5,777.40	12,941.96	6,390.03

Sumber data : Dinas Perikanan Kota Batam

Menunjukkan data produksi kegiatan perikanan budidaya air tawar di Kota Batam selama tiga tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan total produksi mencapai 12.941,96 ton, namun kembali menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 6.390,03 ton. Kecamatan Sekupang mencatat lonjakan tertinggi pada 2022 sebesar 4.562,78 ton, namun produksinya menurun drastis menjadi 1.204,12 ton pada 2023. Kecamatan Galang, Sagulung, dan Sungai Beduk juga merupakan wilayah dengan kontribusi produksi cukup besar, meskipun mengalami fluktuasi. Penurunan tajam produksi pada tahun 2023 di hampir semua kecamatan mengindikasikan adanya tantangan dalam kegiatan budidaya air tawar, baik dari segi teknis, lingkungan, maupun dukungan sarana dan prasarana. Data ini penting untuk dijadikan dasar evaluasi dalam pengembangan dan penguatan sektor perikanan budidaya air tawar di Kota Batam.

Tabel 1. 5 Data Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Kecamatan	Satuan	2022	2023
Bulang	Rp.	13,662,563	2,194,569
Galang	Rp.	40,332,646	8,777,931
Sungai Beduk	Rp.	28,718,869	8,829,0,77
Nongsa	Rp.	37,403,319	7,425,950
Sekupang	Rp.	105,107,275	14,399,202
Sagulung	Rp.	60,373,911	12,731,379
Bengkong	Rp.	2,355,215	667,439
Jumlah		345,142,803	67,085,192

Sumber data : Dinas Perikanan Kota Batam

Menyajikan data nilai produksi perikanan budidaya air tawar di Kota Batam pada tahun 2022 dan 2023. Terjadi penurunan drastis dalam nilai produksi dari Rp345.142.803 pada tahun 2022 menjadi hanya Rp67.085.192 pada tahun 2023. Penurunan ini tercermin di hampir semua kecamatan, termasuk Sekupang yang sebelumnya menjadi penyumbang terbesar dengan Rp105.107.275 pada 2022, turun drastis menjadi Rp14.399.202 pada 2023. Penurunan signifikan juga terjadi di kecamatan Sagulung, Galang, dan Nongsa. Fenomena ini dapat menunjukkan adanya kendala serius dalam proses budidaya, seperti gangguan cuaca, penyakit ikan, kurangnya pembinaan teknis, atau penurunan daya beli pasar. Tren ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengevaluasi program pembinaan serta dukungan terhadap sektor perikanan budidaya air tawar agar nilai ekonominya kembali meningkat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun program telah dijalankan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program menjadi penting dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan kecil di Kota Batam.

Untuk memperkuat intervensi tersebut, pemerintah melalui berbagai kementerian dan dinas teknis telah meluncurkan sejumlah program pemberdayaan dan perlindungan terhadap nelayan kecil. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses terhadap modal, memperkuat kelembagaan, dan mendukung diversifikasi usaha nelayan. Beberapa program yang relevan antara lain bantuan sarana dan prasarana seperti kapal, mesin, dan alat tangkap ramah lingkungan; asuransi nelayan (Asnel) sebagai bentuk perlindungan kerja saat melaut; program dana bergulir melalui LPDB-KUMKM untuk mendukung permodalan koperasi nelayan; serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang mendorong peningkatan profesionalisme nelayan dalam aspek teknis dan manajerial. Selain itu, pengembangan kampung nelayan maju juga dilakukan secara terpadu dengan penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas pengolahan hasil perikanan, dan infrastruktur dasar lainnya. Digitalisasi sistem logistik dan pemasaran seperti e-logbook dan marketplace nelayan turut dikembangkan untuk mendekatkan nelayan dengan pasar dan meningkatkan transparansi data produksi.

Seluruh program tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi rujukan utama yang mengatur hak-hak nelayan dalam memperoleh perlindungan usaha, jaminan risiko kerja, akses pelatihan, serta

dukungan sarana dan prasarana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan serta pemberdayaan nelayan kecil sebagai bagian dari strategi pembangunan perikanan nasional. Untuk pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 memuat rincian teknis terkait perlindungan, bantuan sarana produksi, dan pembiayaan bagi nelayan. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjamin keberlanjutan ruang kelola nelayan kecil dan akses terhadap sumber daya pesisir. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021–2026 menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan landasan program yang kuat dan regulasi yang jelas, maka upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil di Kota Batam memiliki arah kebijakan yang mendukung. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana program-program tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **"EFEKTIVITAS PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL OLEH DINAS PERIKANAN KOTA BATAM"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program, capaian indikator

kesejahteraan, serta hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan kecil di Kota Batam.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dari nilai tukar nelayan (NTN) yang stagnan (tidak berkembang) dari tahun 2021, 2022, 2023.
2. Menurunnya jumlah rumah tangga perikanan tangkap serta nilai produksi perikanan tangkap dari tahun 2022 ke tahun 2023
3. Terjadi penurunan data produksi dan nilai produksi dalam kegiatan perikanan budidaya air tawar dari tahun 2022 ke tahun 2023.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada program-program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Batam, tidak mencakup program dari instansi lain. Sasaran penelitian difokuskan pada nelayan kecil yang berdomisili dan aktif melakukan kegiatan perikanan di wilayah Kota Batam. Aspek kesejahteraan yang dianalisis meliputi indikator ekonomi (pendapatan), sosial (akses pelatihan dan kelembagaan), serta produksi (alat dan sarana penangkapan). Penilaian efektivitas program dibatasi pada periode pelaksanaan tahun 2021 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari informan terpilih secara purposive, sehingga tidak mencakup analisis kuantitatif terhadap seluruh populasi nelayan kecil.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil

oleh Dinas Perikanan Kota Batam?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil Kota Batam

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis efektivitas program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kota Batam.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan nelayan kecil Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Di harapkan dapat memberikan berguna bagi mahasiswa serta masyarakat, orang tua dan pada akademik lainnya. Serta melalui kajian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana efektivitas program dari Dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Kota Batam

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu kemasyarakatan serta sebagai acuan informasi dan keterlibatan pada pemerintahan pada suatu program dari Dinas Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Kota Batam.